

KOMISI I DPRD KULONPROGO
Monitoring Kesiapan Pengawasan Kamtibmas Pemilu 2024

WATES (KR) - Komisi I DPRD Kabupaten Kulonprogo melakukan monitoring terkait kesiapan Pengawasan Keamanan Keterlibatan Masyarakat (Kamtibmas) jelang Pemilu 2024 di Kelurahan Wates dan Kalurahan Kedundang Temon. Di tahun politik atau jelang Pemilu 2024 akan banyak terjadi gesekan yang mungkin kurangnya komunikasi/koordinasi.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Kulonprogo Aris Syarifuddin saat monitoring di Kelurahan Wates dan Kalurahan Kedundang, Jumat (7/7). Aris bersama Dra Keksi Wuryaningsih, Upiya Al Hasan, Nasib Wardoyo SPd, Kalis Gatot Raharjo, dan Staf Setwan diterima Lurah Wates Bambang Sunartito SIP dan jajaran, serta Lurah Kedundang Abdul Rosyid ST dan jajaran.

"Kita melihat sejauhmana upaya Pemerintah Kelurahan maupun Kalurahan dalam menjaga Kamtibmas menjelang Pileg ini. Kita memilih Wates karena merupakan Kota Kabupaten dan juga jumlah pemilihnya banyak," ujar Aris.



KR-Widiastuti

Komisi I DPRD Kulonprogo di Kelurahan Wates.

Aris menuturkan, setelah mendengar penjelasan dari kedua lurah, mereka telah mempersiapkan untuk itu. Saling bekerjasama dengan perlindungan masyarakat (Linmas), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Jaga Warga dan lainnya.

"Harapannya, kondusivitas di kalurahan ataupun kalurahan terjaga, sehingga masyarakat guyub rukun, tidak ada masalah dalam menentukan pilihannya," ucap Aris.

Baik Kelurahan Wates maupun Kalurahan Kedundang mengaku siap menyambut pesta demokrasi. Lurah Wates Bambang Sunartito menyatakan Kelurahan Wates selalu berkoordinasi semua unsur mulai dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, Jaga Warga, Lembaga kemasyarakatan kalurahan (LKK), RT/RW, dan lainnya.

"Saya dan teman-teman

dengan LKK yang ada selalu mengingatkan terkait dengan masalah Pemilu yang sudah diamanahi undang-undang. Kami berterima kasih kepada LKK, Ketua RW, RT, yang sudah membantu kedatangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlil)," ujarnya.

Dikatakan Bambang, kita selalu berkolaborasi untuk pesta demokrasi di Wates, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Karena pertama, Tempat Pemungutan Suara (TPS) kita banyak, jumlah pemilih juga banyak. Diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Pemilu berjalan baik. "Sehingga masyarakat bisa memilih pimpinan yang diharapkan, baik tingkat daerah maupun provinsi, dan pusat," pungkasnya.

(Wid)

BUMKAL Diminta Optimal Manfaatkan Aset Kalurahan

LENDAH (KR) - Pimpinan dan anggota Komisi V DPR-RI berharap Badan Usaha Milik Desa/ Kalurahan (BUMKAL) benar-benar memanfaatkan aset kalurahan yang produktif dan menyediakan usaha serta jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar BUMKAL lebih berkembang maka Kementerian Desa memberi dukungan penuh kepada badan usaha milik kalurahan tersebut. Terutama dalam konsolidasi aset Bumdes, fasilitasi permodalan, peningkatan SDM dan kerjasama dengan pihak terkait.

Pihaknya mengapresiasi inisiasi dan pendampingan Kementerian Desa kepada aparat Kalurahan Jatirejo dan pengurus Bumdes Jati Unggul dalam upaya memperkuat kemandirian dan ekonomi masyarakat desa. Bumdes harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

"Saat ini ekonomi digital Indonesia sedang berkembang dengan pesat sehingga

harus dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat desa demi kemajuan desa," kata Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Ridwan Bae saat kunjungan kerja (kunker) spesifik ke BUMKAL Jati Unggul di Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah, Kulonprogo, Kamis (6/7).

Dijelaskan, Komisi V DPR-RI fokus pengawasan pembangunan dan pengembangan desa khususnya melalui Bumdes untuk memperkuat kehidupan ekonomi dan investasi desa. Sehingga kedatangan para wakil rakyat bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. tersebut untuk melihat langsung kinerja

ja Bumdes dalam mendukung pengembangan desa.

Sementara itu Endang Rosawati perwakilan Kementerian Desa mengatakan, Bumdes merupakan usaha di bidang ekonomi yang dimiliki desa untuk menggali potensi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Saat ini terdapat 49.096 Bumdes dan 5.074 Desa Bersama.

"Di DIY sangat mendorong pendirian Bumdes di setiap kalurahan agar dapat mengetahui keunggulan yang ada di setiap daerah. Di DIY ada 360 desa dan terdapat 425 Bumkal. Sementara di Kulonprogo ada 100 Bumkal," jelas Endang.

(Rul)



KR-Asrul Sani

Plh Bupati Kulonprogo Triyono SIP (kiri) menyerahkan cinderamata kepada Anggota Komisi V DPR RI.

BUPATI DAN TP PKK GUNUNGKIDUL
Terima Penghargaan Manggala Karya Kencana

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H Sunaryanta dan Ketua Tim penggerak PKK Gunungkidul Diah Purwanti Sunaryanta menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari BKKBN Pusat. Penghargaan diserahkan di Sumatra Utara, Selasa (4/7) bersamaan dengan penyerahan kepada bupati, wali kota dan Gubernur yang lain.



KR-Endar Widodo

Bupati H Sunaryanta dan Ny Diah Sunaryanto dengan penghargannya.

Menurut Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo penghargaan diberikan atas keberhasilan pencapaian program Keluarga Berencana serta pembangunan keluarga (Bangga Kencana) di wilayahnya. Bupati berhasil membangun manusia dari sisi fisik termasuk pencegahan stunting, pembangunan karakter dan mental manusia Indonesia.

"Penghargaan ini diraih

atas andil banyak pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Diharapkan capaian ini akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi guna mewujudkan program Bangga Kencana," kata Bupati H Sunaryanta setibanya di Wonosari, Kamis (6/7).

Kabupaten Gunungkidul, kata Kabid Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Mohammad Amuiruddin SSos, berhasil dalam capaian program pengendalian penduduk yang diukur dengan TFR, kesertaan ber KB maupun pemberdayaan masyarakat melalui kampung keluarga berkualitas (kampung KB) dan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, UUPKA serta PIK/R, dan diperkuat dengan dukungan kegiatan konvergensi stunting.

(Ded/Ewi)

GELOMBANG TINGGI PANTAI SELATAN

1 Wisatawan Tergulung Ombak Diselamatkan SAR

WONOSARI (KR) - Pantai selatan Kabupaten Gunungkidul diterjang gelombang tinggi dari kawasan Purwosari hingga Girisubo dengan ketinggian mencapai 4-6 meter Jumat (7/7).

Gelombang tinggi tersebut terjadi sejak dua hari lalu menyebabkan sejumlah kapal ikan terlepas dari jangkar dan hanyut, juga menyebabkan seorang wisatawan asal Surabaya, Jawa Timur terseret ombak.

"Korban bernama Septiana (17) berhasil kami selamatkan," kata Koordinator Tim SAR Satlinmas Korwil II DIY Marjono Jumat (7/7) kemarin.

Informasi akan terjadi gelombang tinggi pantai selatan sudah diketahui melalui peringatan dini Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY beberapa hari sebelumnya.

Karena ituantisipasi langsung dilakukan dengan menerjunkan Tim SAR ke seluruh pantai yang menjadi tujuan wisatawan.

Gelombang tinggi yang terjadi selama dua hari kemarin menyebabkan sejumlah kapal ikan yang sudah dipindahkan di tepi pantai hanyut. Tetapi seluruhnya berhasil dievakuasi menjauhi jangkauan gelombang. Sementara di Pantai Kukup, Tanjungsari seorang wisatawan yang nekat melakukan swafoto diterjang ombak dan terseret gelombang hingga mencapai pukuhannya meter. "Wisatawan bernama Sep-



KR-Istimewa.

Tim SAR siaga pantai mengantisipasi gelombang tinggi.

tiana berhasil kami selamatkan," imbuhnya.

Terpisah Sekretaris SAR Satlinmas Korwil II DIY Surisdianto menambahkan terkait dengan terjadinya gelombang tinggi pihaknya akan terus menjaga bibir pantai di wilayah Gunungkidul hingga gelombang tinggi berangsur normal. Karena sedang musim

liburan maka banyak wisatawan berkunjung ke sejumlah pantai.

Selain berjaga-jaga SAR Satlinmas juga akan terus mensosialisasikan gelombang tinggi ke wisatawan. "Akan kami berikan pemahaman agar tidak bermain air laut di pantai mengantisipasi terjadinya lakalaut," terangnya.

(Bmp)

SYARAT USIA BELUM TERPENUHI

Tinggi, Kasus Permohonan Dispensasi Nikah

WONOSARI (KR) - Permohonan dispensasi pernikahan tahun ini meningkat dari sebelumnya. Dari Januari hingga awal Juli 2023, Pengadilan Agama Wonosari mencatat sudah sebanyak 81 permohonan dispensasi pernikahan. Khusus selama juli 2023 ini terdapat 4 permohonan dengan alasan karena syarat usia calon pengantin belum terpenuhi. "Pada tahun 2022 terdapat 171 permohonan dan capaian tahun ini termasuk masih cukup tinggi," kata pernikahan karena terhalang usia pengantin yang belum mencapai 19 tahun," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Asty Wijayanti Gunungkidul Jumat (7/7).

Terkait tingginya permohonan pi-

haknya sudah mendorong kalurahan se Gunungkidul untuk memiliki peraturan agar bisa mengantisipasi perkawinan anak.

Juga sudah menetapkan regulasi peraturan kalurahan tentang pencegahan perkawinan usia anak. Hal tersebut cukup penting untuk upaya pencegahan perkawinan anak, mulai dari menekan angka putus sekolah hingga mengatasi kemiskinan.

"Kalurahan bisa membuat peraturan berlandaskan Perbup No. 93/2022 tentang Perubahan atas Perbup No 20/2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak," ujarnya.

Antisipasi maraknya perkawinan anak berkaitan dengan berbagai sektor. Karena ini masalah multi-sektor menyangkut anak, pendi-

dikan, sosial, agama, sampai ekonomi. Kalau usia anak sudah menikah rentan memenuhi kebutuhan keluarga dan dimungkinkan kesulitan mencspai sejahtera. Berbagai sektor yang memiliki kepentingan harus saling bahu membahu agar masalah perkawinan anak tidak makin meluas dan menimbulkan masalah-masalah lain, misalnya soal pendidikan kalau banyak yang putus sekolah berarti program wajib belajar akan terganggu. Begitu juga soal lain terutama ekonomi dan kesehatan.

"Belum lagi jika banyak bayi lahir dengan kondisi stunting. karena ibu masih usia muda maka akan rentan menimbulkan masalah juga" ujarnya.

(Bmp)

PRIHATIN KONDISI PASAR BROSOT GALUR KULONPROGO

Komisi II-Disdagin Gagas Revitalisasi

GALUR (KR) - Komisi II DPRD Kulonprogo prihatin melihat kondisi bangunan Pasar Brosot di Kapanewon Galur. Kendati terkendala anggaran, pimpinan dan komisi membidangi ekonomi itu tetap akan menggagas revitalisasi bangunan pasar tradisional Brosot tersebut.

"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kulonprogo sangat terbatas maka untuk membangun Pasar Brosot, kami minta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) mengakses dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat," kata Ketua Komisi II DPRD setempat Yuliantoro SE usai melakukan pemantauan Pasar Brosot bersama anggotanya, Jumat (7/7).

Dalam merevitalisasinya nanti, Komisi II menyarankan

kan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo membangun Pasar Brosot menjadi satu bangunan. Kalau sekarang, los pedagang terpisah. Sehingga ketika musim hujan, air masuk. Selain itu fasad atau muka bangunan Pasar Brosot jatuhan seperti Pasar Bendungan, Wates yang terhalang pagar.

"Kami minta pemkab kalau membangun pasar dalam satu kesatuan sehingga tidak ada air hujan masuk. Selain itu akan lebih efektif," ujarnya menambahkan perekonomian Kulonprogo ditopang pasar rakyat, beda dengan di kota yang ada pasar modernnya.

Selain prihatin dengan kondisi bangunan, para wakil rakyat tersebut juga menyoroti kebersihan Pasar Brosot. Kuat dugaan banyak masyarakat yang bukan penghuni pasar



KR-Asrul Sani

Yuliantoro SE bersama Ir Sudarna (ber-ID Card) meninjau kondisi fisik bangunan Pasar Brosot.

membuang sampah di pasar tersebut. Permasalahan lain yang menjadi perhatian Komisi II adalah mengenai retribusi sampah di pasar.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di Pasar Brosot, Yuliantoro berharap para pihak utamanya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dalam hal ini Perumda BPR Bank Kulonprogo membangun kolaborasi.

"Dengan kolaborasi antara pemkab dan BPR Bank Kulonprogo tentu para pedagang pasar tidak meminjam ke rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Kolaborasi untuk mensejahterakan rakyat," tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.

(Rul/Wid)

ITNY Kembangkan Desa Mitra di Samigaluh

SAMIGALUH (KR)- Untuk meningkatkan manfaat dari hasil kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi upaya pengentasan kemiskinan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) menyepakati kerja sama kemitraan dengan Pemerintah Kalurahan Kebonharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo.

Penandatanganan naskah dokumen kerja sama antara ITNY dan Kalurahan Kebonharjo dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (LPPMI) ITNY, Wayan Suparta SPd MSi PhD serta Lurah Kebonharjo, Sugimo SIP.

Kesepakatan kerja sama antara ITNY dan Kalurahan Kebonharjo ini meru-



KR - Istimewa

Dr Winarti MT serahkan cinderamata kepada Sugimo SIP disaksikan Wayan Suparta PhD (kanan).

pakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati oleh ITNY dengan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk program pengentasan kemiskinan pada 11 Kalurahan di wilayah Kabupaten Kulonprogo.

Turut hadir dalam acara penandatanganan dokumen

kemitraan tersebut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama ITNY, Dr Winarti ST MT dan Staf Ahli Bupati bidang Kesra Bambang Sutrisno.

Dalam sambutannya, Lurah Kebonharjo berharap agar kehadiran ITNY dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalurahan

Kebonharjo, khususnya dalam hal pengembangan wilayah dan penerapan teknologi tepat guna. Kolaborasi yang dijalin antara Kalurahan Kebonharjo dengan ITNY diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

Sedangkan Wakil Rektor Bidang III ITNY, Dr Winarti ST MT menyampaikan kolaborasi yang dijalin dengan Kalurahan Kebonharjo ini merupakan pengembangan dari kiprah yang diberikan oleh ITNY di wilayah Kabupaten Kulonprogo. ITNY sendiri memiliki laboratorium dan kampus lapangan di wilayah Padukuhan Degan di Kapanewon Kalibawang.

(Rul)